

DELIBERASI HIBRIDA DALAM KONFLIK LAHAN PERKOTAAN DAGO ELOS: *COUNTER-PUBLIC* DAN STRATEGI KOMUNIKASI

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik komunikasi deliberatif dalam konflik lahan perkotaan, dengan fokus pada bagaimana komunitas membangun dan mempertahankan ruang dialog di bawah tekanan struktural. Studi kasus kualitatif dilakukan pada konflik lahan Dago Elos di Kota Bandung, yang melibatkan 331 keluarga yang menghadapi tuntutan penggusuran. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat perwakilan pemangku kepentingan: pemimpin komunitas, lembaga bantuan hukum, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga administrasi pertanahan. Penelitian ini mengungkapkan tiga temuan utama: (1) Keterpisahan antar-lembaga menciptakan tidak adanya forum dialog resmi antara komunitas dan pemerintah, memaksa komunitas untuk mengembangkan strategi komunikasi alternatif; (2) Inovasi *counter-public sphere* melalui Forum Dago Melawan menunjukkan penerapan yang berhasil dari prinsip-prinsip deliberatif (partisipasi setara, pembangunan kesepakatan, pemberian alasan) di tingkat akar rumput, yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran demokrasi yang sejati; (3) Strategi komunikasi hibrida muncul ketika komunitas menggabungkan argumen rasional dengan gerakan massa, menantang pemisahan tradisional antara musyawarah yang beralasan dan aksi politik. Aksi massa terbukti efektif dalam memaksa tanggapan lembaga ketika jalur resmi tetap tertutup, menunjukkan bahwa mobilisasi bersama dapat berfungsi sebagai komunikasi musyawarah dalam kondisi yang tidak ideal. Penelitian ini memperluas konsep komunikasi deliberatif dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip musyawarah dapat berfungsi dalam kondisi tidak ideal melalui penyesuaian kreatif dan inovasi kelembagaan dari tingkat bawah. *Counter-public sphere* seperti Forum Dago Melawan dapat berhasil menerapkan situasi komunikasi ideal Habermas dalam konteks lokal, sementara strategi hibrida yang menggabungkan pemberian alasan dengan aksi kolektif menciptakan kekuatan komunikatif yang mampu mempengaruhi tanggapan administratif meskipun terdapat ketimpangan kekuasaan struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi deliberatif yang sejati memerlukan pengakuan dan penanganan ketidaksetaraan kekuasaan daripada menyembunyikannya di balik klaim netralitas prosedural.

Kata Kunci: *counter-public sphere*; komunikasi deliberatif; strategi komunikasi hibrida; demokrasi akar rumput; konflik lahan perkotaan

Hybrid Deliberation in the Dago Elos Urban Land Conflict: Counter-Publics and Communication Strategies

ABSTRACT

This study analyzes deliberative communication practices in urban land conflict, focusing on how communities build and maintain deliberative spaces under structural constraints. A qualitative case study was conducted on the Dago Elos land conflict in Bandung City, involving 331 families facing eviction claims. Data were collected through in-depth interviews with four stakeholder representatives: community leaders, legal aid organizations, local government officials, and land administration agencies. The study reveals three key findings: (1) Institutional fragmentation creates a complete absence of formal dialogue forums between communities and government, forcing communities to develop alternative communication strategies; (2) Counter-public sphere innovation through the Forum Dago Melawan demonstrates successful implementation of deliberative principles (equal participation, consensus-building, reason-giving) at the grassroots level, functioning as a genuine democratic laboratory; (3) Hybrid communication strategies emerge as communities combine rational argumentation with mass mobilization, challenging the traditional dichotomy between reasoned deliberation and political action. Mass actions prove effective in forcing institutional responses when formal channels remain closed, demonstrating that collective mobilization can function as deliberative communication under non-ideal conditions. The research expands deliberative communication theory by showing that deliberative principles can function in non-ideal conditions through creative adaptation and grassroots institutional innovation. Counter-public spheres like Forum Dago Melawan can successfully implement Habermas's ideal speech situation in local settings, while hybrid strategies combining reason-giving with collective action create communicative power capable of influencing administrative responses despite structural power asymmetries. These findings suggest that genuine deliberative communication requires acknowledging and addressing power inequalities rather than hiding them behind claims of procedural neutrality.

Keywords: *counter-public sphere; deliberative communication; hybrid communication strategies; grassroots democracy; urban land conflict*